



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

L K j
LAPORAN KINERJA
2025



<https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id>



@PPDKabupaten Pesisir Selatan



@diskominfoessel



@Kominfo Pessel



@Kominfo Pesisir Selatan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kominfo atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik sektoral selama Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, antara lain Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, serta Rencana Kerja Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Laporan ini memuat informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), serta kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas perangkat daerah.

Melalui penyusunan LKj ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif, terukur, dan akuntabel mengenai kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan, sekaligus menjadi sarana evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Saran dan masukan yang konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.

Painan, 9 Februari 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**WENDI, S.H., M. Hum
NIP. 19760407 199803 1002**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya pada urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik sektoral. Penyusunan LKj ini mengacu pada prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta selaras dengan dokumen perencanaan daerah yang berlaku.

Pada Tahun 2025, Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan informasi publik, perluasan akses dan kualitas infrastruktur TIK, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Secara umum, capaian IKU dan IKK menunjukkan kinerja yang baik, indikator mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu fokus utama kinerja Dinas Kominfo. Sepanjang Tahun 2025, telah dilakukan penguatan pada aspek kebijakan internal, tata kelola, manajemen layanan TIK, serta integrasi aplikasi pemerintahan. Upaya tersebut berdampak pada peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE Kabupaten Pesisir Selatan, yang tercermin dari membaiknya nilai domain dan aspek SPBE dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada integrasi layanan digital dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi lintas perangkat daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2025 secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan indikator kinerja daerah, antara lain perluasan cakupan layanan jaringan internet, peningkatan efektivitas diseminasi informasi publik, serta penguatan pengelolaan data dan statistik sektoral sebagai dasar pengambilan kebijakan. Capaian kinerja tersebut dilaksanakan dengan dukungan pengelolaan anggaran yang relatif efisien dan akuntabel, sehingga output dan outcome kegiatan dapat dicapai secara optimal.

Meskipun capaian kinerja secara umum menunjukkan hasil yang positif, Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur TIK di wilayah tertentu, kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang digital, serta perlunya peningkatan

koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung integrasi SPBE. Tantangan tersebut menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan langkah perbaikan pada periode perencanaan berikutnya.

Melalui LKj ini, Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kinerja melalui penguatan IKU dan IKK yang berorientasi pada hasil, peningkatan nilai SPBE secara berkelanjutan, serta penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan digital di Kabupaten Pesisir Selatan.

MISI 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Pencapaian Kinerja untuk indikator kinerja yang terdapat pada misi 1 sebesar 96,45%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori *Sangat Baik*. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (86)	A (88,24)	102,06%
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	4,25	4,63	108,94%
3	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,40	4,87	110,68%
4	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (99,95)	Informatif (98)	98%
5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	97	96	98,96%

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 LATAR BELAKANG	10
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4 GAMBARAN ORGANISASI	4
1.5 SUMBER DAYA MANUSIA	7
1.6 SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG	9
1.7 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	9
1.8 PERMASALAHAN UTAMA.....	11
1.9 SISTEMATIKA PENULISAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	14
2.3 APLIKASI PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA.....	15
2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA.....	19
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	19
3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
3.4 REALISASI KEUANGAN	74
BAB IV PENUTUP.....	76
4.1 KESIMPULAN	76
4.2 SARAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran	iv
Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	7
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai	8
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural	8
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya	8
Tabel 1. 5 Aset/Modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	9
Tabel 2. 1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	14
Tabel 2. 2 Program dan Anggaran	15
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama dan target capaian Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	17
Tabel 3. 1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 3. 2 Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025	20
Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2025	22
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	23
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	23
Tabel 3. 6 Perbandingan Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025	24
Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	24
Tabel 3. 8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
Tabel 3. 9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	33
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	35
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	36
Tabel 3. 12 Perbandingan Indeks SPBE dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025	36
Tabel 3. 13 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	36
Tabel 3. 14 Nama Aplikasi yang di buat dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2025	39
Tabel 3. 15 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
Tabel 3. 16 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	51
Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	52

Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	53
Tabel 3. 19 Perbandingan Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025	53
Tabel 3. 20 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	54
Tabel 3. 21 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
Tabel 3. 22 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	57
Tabel 3. 23 Tabel kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	57
Tabel 3. 24 Daftar Rekap Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten	62
Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	63
Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	64
Tabel 3. 27 Perbandingan Kategori Keterbukaan Informasi Publik dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025	64
Tabel 3. 28 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	65
Tabel 3. 29 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
Tabel 3. 30 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025	68
Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	70
Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	71
Tabel 3. 33 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	71
Tabel 3. 34 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	72
Tabel 3. 35 Realisasi Anggaran Tahun 2025	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.....	6
Gambar 3. 1 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.....	25
Gambar 3. 2 Dokumentasi Pemberian Reward dan Punishment.....	27
Gambar 3. 3 Dokumen LKj dan Laporan Hasil Evaluasi LKj Tahun 2023.....	28
Gambar 3. 4 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	29
Gambar 3. 5 Matrik Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025.....	31
Gambar 3. 6 Struktur Penilaian SPBE.....	34
Gambar 3. 8 Nilai Indeks SPBE per Domain.....	52
Gambar 3. 9 Presentasi Badan Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tk. Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025.....	60
Gambar 3. 10 Hasil Penilaian Inovasi Tahun 2024.....	69
Gambar 3. 11 Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2025.....	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Grafik Hasil Indeks SPBE tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kemenpan
RB..... 35

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja (LKj) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

- a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
- c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
- d. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan LKj atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, hingga entitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya).

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Komunikasi;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - m. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 tentang Pengelolaan SPBE.
 - n. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini adalah sebagai bahan pelaporan tahunan dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada RPJMD, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja tentang Indikator kinerja Utama tahun 2025, program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber dari Kabupaten Pesisir Selatan, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang komunikasi dan informatika.

1.3.2 Tujuan

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 ini disusun dengan tujuan :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja: bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2024.
2. Aspek Manajemen Kinerja: bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.4 GAMBARAN ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Komunikasi dan Informatika; yang tugas

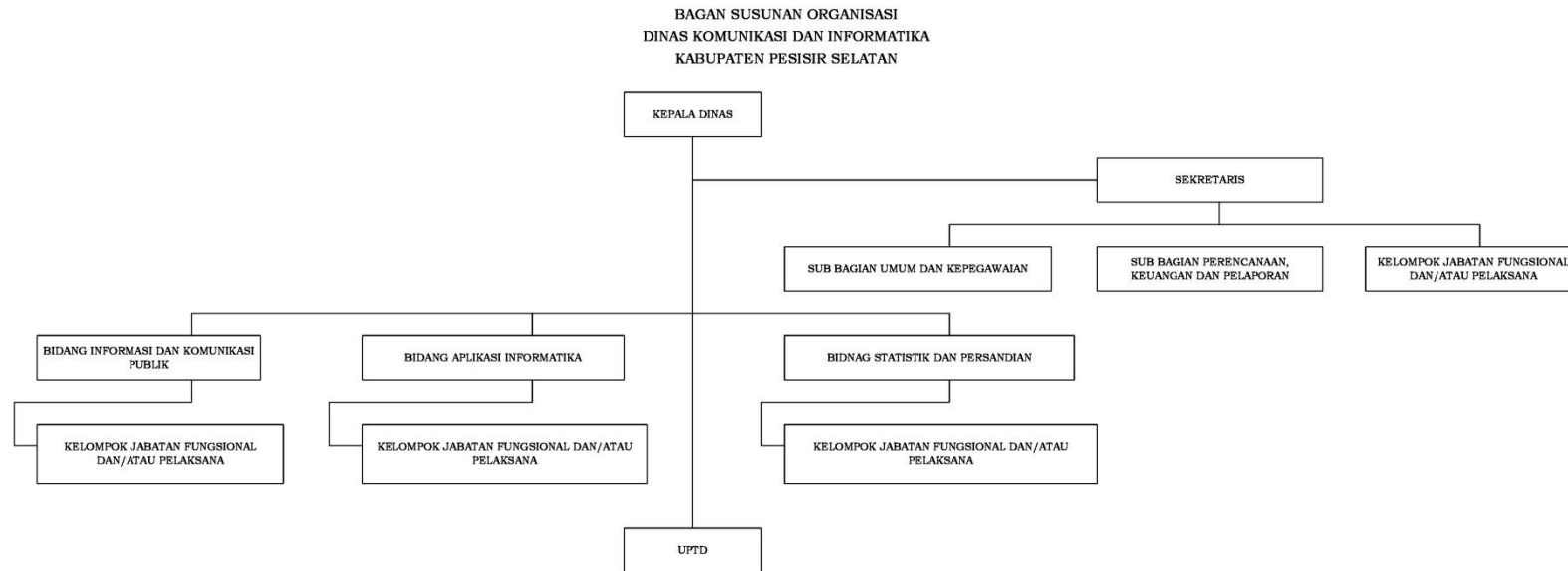
dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 4 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- Tugas :
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- Fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESIRIS SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DA INFORMATIKA

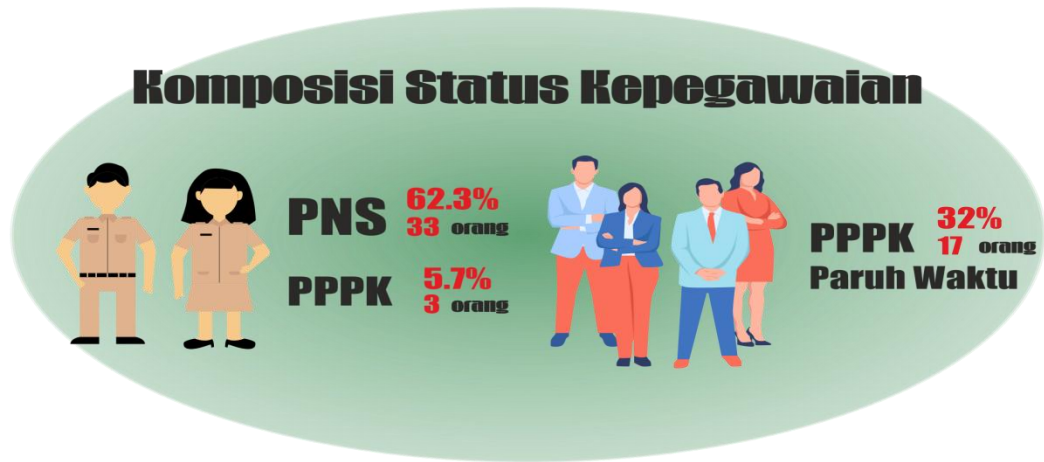


Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai berikut Komposisi Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 adalah sebanyak **35** (tiga puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural adalah sebagai berikut :



Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT / GOL	JUMLAH
1	PEMBINA UTAMA MADYA / IV c	1
2	PEMBINA TK.I/ IV b	2
3	PEMBINA / IV a	1
4	PENATA TK. I / III d	8
5	PENATA / III c	2
6	PENATA MUDA TK.I / III b	9
7	PENATA MUDA/ III a	3
8	PENGATUR TK. I, II/d	3
9	PENGATUR / II c	3
JUMLAH		33

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3	-
2	S2	8
3	S1 / D4	15
4	D III	7
5	D II	-
6	SMU/SMA Sederajat	3
7	SMP	-
8	SD	-
JUMLAH		33

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	DIKLAT PIM II	0
2	DIKLAT PIM III	2
3	ADUM/DIKLAT PIM IV	5
JUMLAH		8

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya

NO.	JABATAN	JUMLAH
1	STRUKTURAL	7
2	FUNGSIONAL TERTENTU	21
3	FUNGSIONAL UMUM	5
JUMLAH		33

1.6 SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. 5 Aset/Modal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Asset	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kendaraan Dinas (Mobil)	3	Buah	
2	Kendaraan Dinas (Motor)	10	Buah	
3	Studio Radio Langkisau	1	Unit	
4	Kamera Foto Biasa	2	Buah	
5	Komputer/Destop	14	Buah	
6	Laptop	25	Buah	
7	Server	8	Unit	
8.	GPS	1	Unit	
9.	Infocus	2	Unit	
10.	CCTV	26	Unit	
11.	NVR	4	Unit	
12.	Handicam	1	Unit	
13.	Kamera Studio	2	Unit	
14.	Televisi	7	Buah	
15.	Mini PC	3	Unit	
16	Printer	15	Unit	
17	Router Board	2	Unit	
18	Penunjang Server dan Aplikasi	1	Paket	
19	Mini Tower	13	Buah	
Jumlah		136		

1.7 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki beberapa aspek strategis yang penting untuk diperhatikan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa aspek strategis tersebut antara lain:

1. Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi dan Teknologi Informasi yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas untuk memastikan aksesibilitas dan konektivitas yang merata di seluruh wilayah.

2. Pengaturan dan Pengawasan berbagai aspek terkait komunikasi, teknologi informasi, dan media massa untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, perlindungan konsumen, serta keamanan dan integritas data.
3. Mendorong produksi dan distribusi konten digital yang bermutu, informatif, dan edukatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat.
4. Memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui program-program pelatihan, sosialisasi, dan advokasi untuk meningkatkan partisipasi dalam ekonomi digital dan memperkuat daya saing.
5. Memastikan perlindungan data pribadi dan keamanan siber melalui pengembangan kebijakan, regulasi, dan infrastruktur yang sesuai dengan standar keamanan informasi internasional.
6. Pengembangan Inovasi Teknologi: Mendorong inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta mendukung ekosistem startup dan industri kreatif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan daya saing nasional.
7. Kemitraan dan Kolaborasi: Membangun kemitraan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program-program di bidang komunikasi dan informatika.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program di bidang komunikasi dan informatika untuk memastikan pencapaian tujuan dan efisiensi penggunaan sumber daya.
9. Mengelola dan mengawasi penyiaran serta penyelenggaraan informasi untuk memastikan akses informasi yang merata, akurat, dan transparan bagi masyarakat.
10. Membangun kapasitas dalam penanganan darurat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menghadapi dan merespons ancaman keamanan siber serta gangguan teknis lainnya dengan cepat dan efektif.
11. Melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi Statistik, Peningkatan Kualitas Data, Pengembangan Kapasitas SDM, Penggunaan Teknologi dan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan pada urusan statistik sektoral.

1.8 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang dihadapi di dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi dan Teknologi Informasi yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas untuk memastikan aksesibilitas dan konektivitas yang merata di Kab.Pesisir Selatan
2. Mendorong produksi dan distribusi konten digital yang bermutu, informatif, dan edukatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat
3. Pemberdayaan Masyarakat Digital dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui program-program pelatihan, sosialisasi, dan advokasi untuk meningkatkan partisipasi dalam ekonomi digital dan memperkuat daya saing.
4. Memastikan perlindungan data pribadi dan keamanan siber melalui pengembangan kebijakan, regulasi, dan infrastruktur yang sesuai dengan standar keamanan informasi internasional.
5. Pengembangan Inovasi Teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
6. Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program di bidang komunikasi dan informatika untuk memastikan pencapaian tujuan dan efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Penyiaran dan Penyelenggaraan Informasi Publik untuk memastikan akses informasi yang merata, akurat, dan transparan bagi masyarakat.
8. Memastikan akurasi dan validitas data, standarisasi data, aksesibilitas data dan resiko terhadap keamanan data.

1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD, diwujudkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Pohon Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dan melakukan rasionalisasi terhadap RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, seiring dengan itu juga dilakukan penyusunan terhadap pohon kinerja Perangkat Daerah dan rasionalisasi terhadap Cascading dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

2.1.1 Visi

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan bermartabat didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”**

2.1.2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif Demokratis dan Transparan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat;

- 3) Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan;
- 5) Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing; dan
- 6) Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Berdasarkan keenam misi tersebut, dapat dilihat bahwa misi I berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, yakni : **“Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.”**

2.1.3 Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran

Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2025 ada lima sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja
2. Meningkatkan Kapabilitas Birokrasi
3. Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan
4. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik
5. Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun yang ditandatangani antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A(86)	A (88,24)
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	4,25	4,63
3	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,40	4,87

		(SPBE)		
4	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	INFORMATIF (99,95)	INFORMATIF (98)
5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	97	96

Dalam mewujudkan sasaran strategis yang sudah direncanakan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Program dan Anggaran dari program tersebut pada tahun 2025 yang tertera pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Program dan Anggaran

Program	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.711.711.860,-
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.147.348.376,-
Program Aplikasi Informatika	Rp. 2.359.291.034,-
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 83.123.202,-
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 41.556.178,-
Total Anggaran	Rp. 8.343.030.650,-

2.3 APLIKASI PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pesisir Selatan, berbagai aplikasi pendukung dapat digunakan untuk membantu mencapai kinerja yang optimal. Beberapa aplikasi yang digunakan antara lain:

1. Aplikasi Penatausahaan Keuangan SIPD RI
2. Aplikasi E-SAKIP untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo
3. Aplikasi IGA untuk melihat penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif.
4. Aplikasi Simbangda untuk melihat capaian realisasi fisik dan keuangan pada pelaksanaan program kegiatan.

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mengukur keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika maka Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran yang disajikan dalam table berikut :

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama dan target capaian Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Indikator Sasaran	Satuan	Target (Rumus)	Target						Penanggung jawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1 : Memperkuat tata laksana pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan									
1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Tanpa Satuan	Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah/ Inspektorat Daerah	A	A	A	A (84,5)	A (86)	A (86,5)	Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Indeks SPBE	Nilai	Hasil evaluasi Kemen PAN RB	3,35	3,40	3,55	4,20	4,25	4,30	
3. Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	$Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} + \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ <ul style="list-style-type: none"> Indeks Domain adalah nilai indeks domain ke-I; Bdi adalah nilai bobot domain ke-I; Naij adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-I; Baij adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-I. 	4,19	4,20	4,21	4,76	4,40	4,45	

4. Kategori Informasi Publik	Keterbukaan	Angka	Hasil evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat	<i>Informatif (93)</i>	<i>Informatif (93)</i>	<i>Informatif (99,92)</i>	<i>Informatif (99,95)</i>	<i>Informatif (99,95)</i>	<i>Informatif (99,95)</i>
5. Nilai Inovasi Daerah	Kematangan Inspektorat	Tanpa Satuan	Hasil Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah yang diinput di aplikasi Innovation Government Award	-	100	100	100	97	97

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025			Predikat
		Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A(86)	A(88,24)	102,60%	Sangat Baik
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	4,25	4,63	108,94%	Sangat Baik
Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,76	4,87	110,68%	Sangat Baik
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	INFORMATIF (99,95)	INFORMATIF (98)	98%	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	97	96	98,96%	Sangat Baik
Rata-rata capaian (%)				101.34 %	Sangat Baik

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 ini ada 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yaitu :

- 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target A (86).

Capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika adalah A (88,24) atau sebesar 102,60% dengan predikat **Sangat Baik**.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika ini memakai nilai evaluasi Tahun 2024 dikarenakan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 diperoleh dari nilai evaluasi laporan kinerja Tahun 2024.

- 2) Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan dengan Target 4,25
Capaian indikator Indeks SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 4,63 atau sebesar 108,94% dengan predikat **Sangat Baik**.
- 3) Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan dengan target 4,76
Capaian indikator Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 4,87 atau sebesar 110,68 % dengan predikat **Sangat Baik**.
- 4) Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik dengan target informatif (99,95).
Capaian Indikator Kategori Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Informatif (98) atau sebesar 98 % dengan predikat **Sangat Baik**.
- 5) Nilai Kematangan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target 97.
Capaian indikator Nilai Kematangan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 96 atau sebesar 98,96% dengan predikat **Sangat Baik**.

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2 diatas, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.



**SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN
YANG AKUNTABEL DAN BERKINERJA**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja		2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A(86)	A(88,24)*	102,60%
Rata- Rata capaian (%)				102,60%

*Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024*

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2026

Dari Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (83,94)	A (84,5)	A (86)	A (83,94)	A (85,49)	A (88,24)	A (83,94)	A (85,49)	A (88,24)*

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir 2021-2026	Capaian Tahun 2025	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (86,05)	A (88,24)*	102,60 %	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3. 6 Perbandingan Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (88,24)*	B (69,78)	-

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

**) Data Capaian Tahun 2022

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A(86)	A(88,24)*	102,60%

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Faktor pendorong dalam Meningkatkan Nilai AKIP Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- a) Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b) Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c) Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan

- d) Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/login>.



Gambar 3. 1 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya. Pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan dalam pemberian *reward* dan *punishment*. Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2025 telah memberikan *reward* dan *punishment* terhadap capaian kinerja bawahan. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika menilai kinerja bawahannya melalui tingkat kedisiplinan dan layanan pembuatan konten diseminasi informasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dapat dilihat hasil monev terhadap kontributor pada Gambar 3.2 dibawah ini :





Gambar 3. 2 Dokumentasi Pemberian Reward dan Punishment

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKJ) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.4 dibawah ini dapat dilihat Cover Laporan Kinerja yang telah disusu serta cover Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



Gambar 3. 3 Dokumen LKj dan Laporan Hasi Evaluasi LKj Tahun 2024

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi.
- f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3. 8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Realisasi			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (86)	A (88,24) *	102,60%	4.711.711.860	4.573.356.549	97,06%	4,90 %

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Rp. 4.711.711.860,-} \times 102,06\%) - \text{Rp.4.573.356.549,-}}{\text{Rp. 4.711.711.860,-} \times 102,06\%}$$

$$\frac{\text{Rp. 4.808.773.124} - \text{Rp. 4.573,356.549}}{\text{Rp. 4.808.773.124}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 235.416.575}}{\text{Rp. 4.808.773.124}} \times 100\% = 4,90 \%$$

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah A (86), dan untuk realisasi hasil evaluasi Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dengan nilai A (88,24) serta untuk capaian kinerja sebesar 102,60%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 4,90 % apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar A (86).

II. HASIL EVALUASI

A. Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 pada Dinas Komunikasi Dan Informatika memperoleh nilai **88,24** dengan predikat "A". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan", dengan rincian nilai sebagai berikut :

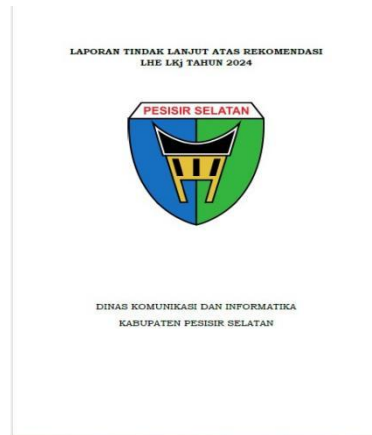
No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,21
2	Pengukuran Kinerja	30,00	26,08
3	Pelaporan Kinerja	15,00	14,20
4	Evaluasi Internal	25,00	21,75
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		88,24
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Gambar 3. 4 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

Dari hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

- 1) Pengukuran Kinerja
 - a) Melakukan perbaikan terhadap target sasaranmeningkatkan kualitas inovasi daerah agar target dapat dicapai sehingga memenuhi kriteria SMART.
 - b) Anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan sepenuhnya mendukung kinerja kinerja yang ingin dicapai.
 - c) Melakukan pemantauan kinerja dalam periode bulan. Apabila terdapat deviasi agar dilakukan analisis dan pemberian solusi ats permasalahan yang ditemukan.
 - d) Notulen rapat monitoring rencana aksi memaparkan analisa terkait faktor hambatan/permasalahan dalam pencapaian target serta tindak lanjut yang telah atau harus dilaksanakan.
 - e) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai dengan baik sesuai dengan rencana.
- 2) Pengukuran Kinerja
 - a) Agar data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur dan membantu capaian kinerja yang diharapkan.
 - b) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi terutama aplikasi E-Sakip dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
- 3) Pelaporan Kinerja
 - a) Melakukan peningkatan kepedulian pegawai terhadap informasi Laporan kinerja.
 - b) Memanfaatkan Informasi laporan kinerja dalam hal ini perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik pada periode berikutnya .
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a) Dalam melakukan pemantauan capaian kinerja internal minimal membahas target kinerja, realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi.
 - b) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi aplikasi E-Sakip dalam melakukan pemantauan capaian kinerja.
 - c) Menfaatkan hasil penilaian AKIP untuk perbaikan,peningkatan, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas kinerja.

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat laporan tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :



Gambar 3. 5 Laporan Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.573.356.549,- atau 97,06% dari total anggaran sebesar Rp. 4.711.711.860,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2,94%.



SASARAN 2 :

MENINGKATNYA KAPABILITAS BIROKRASI

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kapabilitas birokrasi terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks SPBE.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3. 9 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja		2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks SPBE	4,25	4,63	108,94%

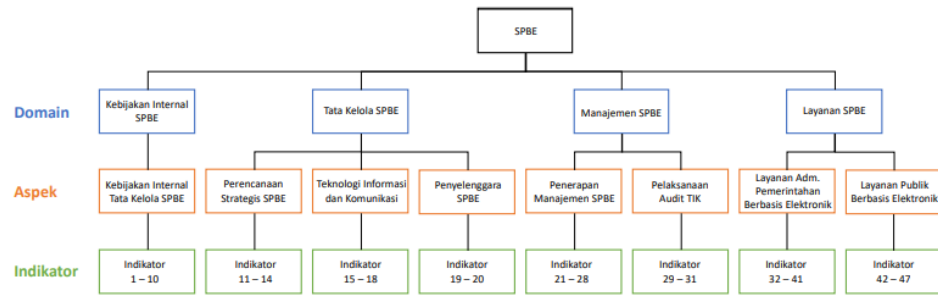
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Indeks SPBE Tahun 2025 dengan tingkat capaian 4,63 dengan capaian 108,94 % predikat **sangat baik** dari target 4,25 .

Indeks SPBE merupakan nilai menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.



Gambar 3. 6 Struktur Penilaian SPBE

Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

- 1) Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
- 2) Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
- 3) Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
- 4) Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
- 5) Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat kepentingan yang berbeda. Secara total domain layanan SPBE diberikan nilai bobot 55%, domain tata kelola SPBE diberi nilai bobot 28%, dan domain kebijakan internal SPBE diberi nilai bobot 17%. Demikian pula, setiap aspek dari sebuah domain diberikan nilai bobot yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot setiap domain dan aspek dapat dilihat pada Tabel 3.6, Sedangkan nilai bobot setiap indikator dapat dihitung dari nilai bobot sebuah aspek dibagi dengan jumlah indikator pada aspek tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai 4,63 dengan prediket Memuaskan .

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Indeks SPBE Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
1	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	3,55	4,20	4,25	4,17	4,23	4,63	4,17	4,23	4,63

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.10 di atas dapat dilihat bahwa Indeks SPBE setiap tahun mengalami kenaikan. Pada Tahun 2025 kenaikan sebesar 0,4% dari tahun 2024



Keterangan :

- Indikator penilaian dari Tahun 2018-2020 sebanyak 35 indikator
- Indikator penilaian dari Tahun 2021-2025 sebanyak 47 indikator

Grafik 3. 1 Grafik Hasil Indeks SPBE tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks SPBE dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir 2021- 2026	Capaian Tahun 2025	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	4,30	4,63	108,94%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks SPBE dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3. 12 Perbandingan Indeks SPBE dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
1	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	4,63	3,75	3,12

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Indeks SPBE dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini :

Tabel 3. 13 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	4,25	4,63	108,94 %

Faktor pendorong dalam Peningkatkan Indeks SPBE , adalah :

- Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah terdapatnya 1 aspek penerapan SPBE yaitu aspek kebijakan

internal tata kelola SPBE yang sudah mendapatkan nilai yang sempurna, diikuti oleh 6 aspek yaitu aspek perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara SPBE, penerapan manajemen SPBE, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik.

- Satu aspek lainnya yaitu aspek pelaksanaan audit teknologi informasi komunikasi masih perlu disempurnakan. pelaksanaan audit TIK yang optimal akan mendorong kemajuan yang signifikan di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal transparansi, keamanan, efisiensi, kualitas layanan, dan keputusan berbasis data.
- Audit yang dilakukan secara terencana dan teratur serta mendalam akan membantu pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan TIK, mencegah risiko, serta meningkatkan pelayanan publik yang lebih responsif dan modern. Dengan demikian, audit TIK bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga instrumen penting untuk mendorong transformasi digital yang lebih baik dan efisien di sektor publik.

Namun di sisi lain penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan masih terdapat satu kelemahan, yaitu: Penerapan Manajemen perubahan SPBE. Pelaksanaan manajemen perubahan yang optimal di pemerintah daerah tidak hanya mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan layanan publik, tetapi juga membuka jalan bagi inovasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan perubahan yang terkelola dengan baik, pemerintah daerah dapat menjadi lebih responsif, lebih transparan, dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan, baik dalam aspek teknologi, pengelolaan sumber daya, maupun pelayanan masyarakat. Maka oleh sebab itu, Amat penting sekali bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen perubahan SPBE ini. Untuk itu ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan.

1. Meningkatkan penerapan manajemen perubahan, membutuhkan pendekatan yang terencana, sistematis, dan melibatkan berbagai stakeholder dan pengembangan SDM.
2. Dapat didukung pula dengan peningkatan pengelolaan risiko, serta pendekatan berbasis data dan teknologi.

3. Untuk setiap indikator yang ada, perlu dilakukan proses reviu dan evaluasi secara berkala. Kemudian proses tindaklanjutnya pun harus segera dilakukan paling lambat dalam periode 1 tahun.

Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi menjadi salah satu factor dalam peningkatan nilai SPBE

Tabel 3. 14 Nama Aplikasi yang di buat dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2025

NO	Nama Aplikasi	Nama Lengkap	Kegunaan/ Fungsi	Programmer	Platform	Motode Akses	Tahun Pembuatan	Tahun penggunaan	Tahun Pengembangan
1	SIPD	Sistem Infromasi Pemerintah daerah	Perencanaan,Peng anggaran dan Penatausahaan	Pusdatin Kemendagri,Rezki Fernando Putra, S.Kom	Web	Online - Web Browser		2019	
2	GIS Insfrastuktur				Dekstop		2017		
3	E-PLANNING	Sistem Informasi Perencanaan	Perencanaan Pembangunan		Web	Online - Web Browser	2017		
4	E-PAD	Elektronik Pajak Daerah	Pengelolaan Pajak		Web	Online - Web	2017		
5	SISMIOP	Sistem Manajemen Infromasi Objek Pajak	Mengintegrasikan seluruh aspek		Dekstop		2017		
6	SAPK	Sistem Aplikasi Pelayanan	Digunakan dalam		Web	Online - Web	2017		
7	SIM GAJI				Dekstop	Online - Web	2017		
8	SIPKD	Sistem Informasi	Penatausahaan		Web	Online - Web	2017	2017	
9	SIPKD Modul	Sistem Informasi	Publikasi Menu		Web		2017		
10	E-RTLH						2017		
11	E-PUSKESMAS	Elektronik Puskesmas	Sarana Pengolahan Data Puskesmas		Web		2017		

12	SLRT						2017		
13	SIKS-NG						2017		
14	SIM-PKH						2017		
15	SIMFONI						2017		
16	SIMDAPODIK				Web		2017		
17	SIMTUN				Web		2017		
18	SIMDAK				Web		2017		
19	SIMUN				Web		2017		
20	SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Aplikasi Pengelolaan Kependudukan		Web	Online - Lokal	2017		
21	SIM-PKB						2017		
22	SLIMS				Web		2017		
23	SISKEUDES	Sistem Informasi Keuangan Desa			Dekstop	Online - Remote Desktop	2015	2016	2016-2021
24	CELOK	Cek Lokasi Pessel	Informasi Lokasi Wisata Pesisir	Riki Dwi Putra, M. Kom	Android	Mobile Android	2017	2017	2019
25	TV Pessel	TV Pessel	Media Publikasi Pemda Pesisir Selatan	Riki Dwi Putra, M. Kom	Web	Online	2017	2017	
26	PRODESKEL						2017		

27	PORTAL DESA						2017		
28	SIPO				Web		2017		
29	SPIPISE						2017		
30	ANJAB-ABK				Web		2017		
31	JKN				Web		2017		
32	SPSE / SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan			Web		2017		
33	INAPROC				Web		2017		
34	E-FORMASI				Web		2018		
35	Talent Pool				Web		2018		
36	SIM-RS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit		Riki Dwi Putra, M.Kom, Masri Prima Doni, M.Kom	Dekstop	Online-Lokal	2018		
37	E-BOS				Web		2018		
38	Aplikasi Antrian Pelayanan		Sistem Layanan Antrian PTSP	Masri Prima Doni, M.Kom	Dekstop		2018		
39	E-LAPOR	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat	Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat		Web	Online-Web Browser	2018		
40	SIMANTRA	Sistem Informasi	Layanan	Dedet Masriyuni,	Web	Online-Lokal	2018		

		Manajemen Integrasi	Penghubung/Integrasi	S. Kom					
41	DASHBOARD	Website Pesisir Selatan	Portal Pemerintah Daerah	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online-Web	2018	2018	2019
42	OSS	Online Single Submission			Web	Online-Web Browser	2018		
43	SIBAPER	Sistem Informasi Barang Persediaan	Administrasi Aset Kantor	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2018	2018	
44	Web Client Pajak	Web Client E-PAD Pessel	Administrasi Pajak Daerah	Zikri Nur Mustafa, M.Pd.T	Web	Online - Web	2019		
45	eTPP	Aplikasi Tambahan Penghasilan	Digunakan untuk entry laporan harian	Masri Prima Doni, M.Kom	Web - Mobile Android	Online - Web	2019	2021	2021;2022; 2023
46	SIMPEG	Sistem Informasi Kepegawaian	digunakan untuk hal-hal terkait	Brahmana Adi Putra(BKPSDM),Masri Prima Doni, M.Kom,	Web	Online - Web	2019		2022;2023
47	SIPENAMPUNGSINAR	Sistem Informasi Penampungan Data	Tata kelola Data Kampung Nagari	Riki Dwi Putra, M. Kom, Rezki Fernando Putra, S. Kom	Web	Online - Web Browser	2019	2019	
48	PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Informasi Publik	Riki Dwi Putra, M. Kom, Masri Prima Doni, M.Kom, Rama, Rezki	Web	Online - Web	2019	2019	
49	WBS	Whistle Blowing System	Pengawasan Internal	Sudindri Rahmad Februanda, S.T	Web	Online - Web	2019		
50	E-SPPD	Sistem Informasi Perjalanan Dinas	Monitoring Perjalanan Dinas Pemda	Kominfo Prov. Sumbar, Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2019	2019	2020;2021
51	SIMAYA	Sistem Administrasi Perkantoran Maya	Administrasi Surat-menyerurat	Kominfo Prov. Sumbar, Masri	Web	Online - Web	2019	2019	2020

				Prima Doni, M.Kom					
52	MANDEH	Monitoring Anggaran Desa Hebat	Untuk melakukan monitoring	Ramadani Ilham, S.Kom	Web	Online - Web	2019	2020	202.020.21 2.022
53	WEBSITE BERITA	Webiste Pemerintah Kabupaten	Media Publikasi Berita Pemerintah	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2019	2019	2020;2021
54	SINAR - 182 SUB DOMAIN	Sistem Informasi Nagari	Mempercepat pengelolaan data desa, mempercepat pelayanan, memanfaatkan data desa, dan mewujudkan transparansi pengelolaan pemerintahan desa	Riki Dwi Putra, M. Kom, Masri Prima Doni, M.Kom, Ramadani Ilham, S.Kom, Rezki Fernando Putra, S. Kom	Web	Online - Web Browser	2019		
55	SiCANTIK Cloud	Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik	Indetifikasi Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik	Kemenkominfo, Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web Browser	2019	2019	2020;2021
56	SIMARDI			Rezki Fernando Putra, S. Kom	Dekstop		2019		
57	E-SAKIP	Sistem Informasi Akuntabilitas Pemerintahan	Sistem Akuntabilitas Pemerintah	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2019	2019	2020;2021; 2022;2023
58	JDIH	Jaringan Dokumentasi Informasi Publik	Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum	Riki Dwi Putra, M. Kom, Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web Browser	2019	2019	2020

			secara tertib,						
59	SIMBANGDA	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Administrasi Pembangunan Daerah	Setda Prov. Sumbar, Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2019	2021	2022
60	TALIKASI	Portal Layanan Informasi & Komunikasi Terintegrasi	Portal Layanan Informasi Komunikasi	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web Browser	2019	2019	
61	WEBSITE OPD	Webiste Perangkat Daerah	Media Publikasi Perangkat Daerah	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web Browser	2018	2018	2020;2021; 2022
62	E-KINERJA BKN	Sistem Informasi Kinerja ASN	Evaluasi Kinerja ASN	BKN, Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2020	2021	2022
63	WEBSITE LPPL RADIO LANGKISAU	Lembaga Penyiaran Publik Lokal	Media Publikasi Radio Langkisau FM	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web Browser	2018	2018	
64	APLIKASI WEB MAIL OPD	Mail Perangkat Daerah	Surat Menyurat Perangkat Daerah	Dedet Masriyuni, S.Kom	Web	Online-Web Browser	2017		
65	APLIKASI WEB MAIL ASN	Mail Perangkat Daerah	Surat Menyurat ASN Pemda	Dedet Masriyuni, S.Kom	web	Online-Web Browser	2017		
66	APLIKASI CLOUD KOMINFO	Storage Dan Share Data			Web	Online-Web Browser	2018		
67	SIMHP				Web		2021		
68	SIPTL				Web		2021		

69	LAPOR SP4N	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan	Monitoring Pengelolaan Pengaduan	Kemenpan RB	Web	Online - Web	2021		
70	OPENDATA	Satudata terbuka	Publikasi data Sektoral Pemerintah	Riki Dwi Putra, M. Kom	Web	Online - Web	2021	2021	2022
71	UKW	Unit Kepatuhan Warga	Aplikasi Pelaporan Masyarakat	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2021		
72	IBI PESSEL	Ikatan Bidan Indonesia Pesisir Selatan	Ujian kompetensi bidan di pesisir	Ramadani Ilham. S, Kom	Web	Online - Web	2021	2021	2022
73	PESSEL DALAM	Pesisir Selatan Dalam Genggaman	Digunakan untuk melihat data	Riki Dwi Putra, M. Kom, Masri Prima Doni, M.Kom, Rezki	Android	Online -	2022	2022	
74	BPHTP Pajak	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Pendaftaran Hak atas tanah dan	Ramadani Ilham. S. Kom, Masri Prima Doni. M. Kom	Web	Online - Web Bro	2022	2023	2023
75	ABON Pessel	Absensi Online	Mempermudah Pengambilan Absensi	Masri Prima Doni, M.Kom	Android	Online -	2021	2021	2022, 2023
76	APLIKASI FLLAJ BERBASIS WEB	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Sebagai wadah pelaporan masyarakat terkait Lalu Lintas dan Angkutan	Feby Pramadian. S. Kom	Web	Online - Web Browser	2020		
77	APLIKASI BEASISWA PESSEL	Aplikasi Beasiswa Pesisir Selatan	Untuk Menjaring Siswa/i berprestasi yang berada di kabupaten Pesisir Selatan	Feby Pramadian. S. Kom	Web	Online - Web Browser	2020		
78	APLIKASI UPK DPMDPPKB	Unit Pengelola Keuangan	Berfungsi untuk mempermudah Pengelolaan	Feby Pramadian. S. Kom	Web	Online - Web Browser	2021		

			Keuangan pada Unit						
79	SiRomet	Aplikasi Room Meeting	Berfungsi untuk mempermudah pemakaian ruangan pertemuan	Feby Pramadian. S. Kom	Web	Online - Web Browser	2022		
80	APLIKASI FLLAJ BERBASIS ANDROID	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Monitoring Penggunaan Lalulintas dan pengguna jalan	Feby Pramadian. S. Kom	Android	Online - Mobile Android	2022	2022	
81	Aplikasi Vaksin	Aplikasi Vaksin	Monitoring penggunaan Vaksin	Feby Pramadian. S. Kom	Web	Online - Web Browser	2021		
82	Aplikasi Informasi Digital	Aplikasi Informasi Digital	Sebagai sarana untuk menampilkan informasi berupa gambar, video, Teks	Feby Pramadian. S. Kom	Web - Client	Online	2019		
83	Aplikasi e-Monev	Evaluasi Monitoring	Digunakan untuk Monitoring capaian	Rezki Fernando Putra, S. Kom	Web	Online - Web	2018		
84	Siguru	Sistem Informasi Guru Kontrak	Monitoring Informasi Guru Kontrak	Riki Dwi Putra, M. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
85	Simapan	Sistem Informasi Masyarakat Penerima	Digunakan untuk melakukan	Rezki Fernando Putra, S. Kom	Web	Online - Web	2021	2022	
86	SPBE	Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik	Digunakan untuk pelaksanaan penilain spbe secara internal	Rezki Fernando Putra, S. Kom	Web	Online - Web Browser	2021	2021	2022;2023
87	siPENDEKAR	Sistem Informasi Pemadam Kebakaran	kejadian di pesisir selatan dan	Ramadani Ilham, S.Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
88	siGAP-DANA	Sistem Informasi Tanggap Bencana	alam	Ramadani Ilham, S.Kom	Web	Online - Web	2022	2022	

89	PPDB Online	Penerimaan Peserta Didik Baru	Sistem Penerimaan Siswa SMP	Riki Dwi Putra, M. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
90	eSURVEY	Survey Statistik Potensi Nagari	Daerah melalui Survey Statistik	Rezki Fernando Putra, S. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
91	siMANTAN	Sistem Informasi Manajemen Pertanahan	Manajemen Pertanahan	Feby Pramadian. S. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
92	Lapau PESSSEL	Aplikasi Pemasaran Produk UMKM Pessel	Aplikasi Pemasaran Produk UMKM	Rezki Fernando Putra, S. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
93	Manrisk SPBE	Aplikasi Manajemen Risiko SPBE	Pengolahan Data OPD Untuk SPBE	Ramadani Ilham. S. Kom	Web	Online - Web Browser	2020	2022	2022;2023
94	SIPPORA Pessel	Aplikasi Informasi Pariwisata	Informasi Pariwisata	Riki Dwi Putra, M. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
95	Pronasa	Program Nagari Bersekolah	Untuk pendataan dan monitoring	Riki Dwi Putra, M. Kom, Ramadani Ilham, S.Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
96	E-Inflasi	Laporan Pengawasan Inflasi Daerah	Untuk laporan pengawasan harga	Riki Dwi Putra, M. Kom	Web Mobile	Online - Web	2022	2022	
97	Booking Semangki	Aplikasi tiket booking wisata semangki	Untuk melakukan pemesanan tiket	Riki Dwi Putra, M. Kom	Web Mobile	Online - Web	2022	2023	
98	Puskesmas SIMRS	Aplikasi Manajemen Puskesmas	Untuk manajemen layanan puskesmas	Riki Dwi Putra, M. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
99	Parenting	Percepatan Aksi Recovery Stunting	Untuk verifikasi data stunting	Rezki Fernando Putra, S. Kom	Web	Online - Web	2023	2023	
100	eTLHP	Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Feby Pramadian. S. Kom	Web	Online - Web	2023	2023	
101	siANJASMARA	Aplikasi Kerjasama Perusahaan Pers	Kerjasama Media Massa	Feby Pramadian. S. Kom	Web	Online - Web	2023	2023	
102	eASET BMD	Aplikasi Manajemen Aset daerah	Pengelolaan Barang Milik daerah	Masri Prima Doni, M.Kom	Web	Online - Web	2023	2023	
103	SIMPADDEH	Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah	Administrasi Pajak Daerah	Ramadani Ilham, S.Kom, Masri	Web	Online - Web	2019	2022	2022

				Prima Doni, M.Kom,					
104	Aplikasi covid 19	sistem informasi monitoring sebaran virus covid	peta informasi sebaran	Riki Dwi Putra, M.Kom	Web			2019	
105	E-BPHTB	E- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Pendataan pajak BPHTB	Ramadani Ilham, S.Kom	Web	Web Browse	2023	2024	2026
106	E-PBB	E-Pajak Bumi Bangunan	Pendataan data PBB	Ramadani Ilham, S.Kom	Web	Web Browser	2024	2024	2025

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3. 15 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Realisasi			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	4,25	4,63	108,94 %	2.359.291.034	2.322.012.415	98,42%	9,66 %

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Rp. 2.359.291.034,-} \times 108,94\%) - \text{Rp.2.322.012.415,-}}{\text{Rp. 4.711.711.860,-}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 2.570.211.652} - \text{Rp. 2.322.012.415}}{\text{Rp. 2.570.211.652,-}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 248.199.257,-}}{\text{Rp. 2.570.211.652,-}} \times 100\% = 9,66 \%$$

Target Indeks SPBE Tahun 2025 adalah 4,25, dan untuk realisasinya Tahun 2025 sebesar 4,63 serta untuk capaian kinerja sebesar 108,94%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 9,66 % apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 4,23.

**g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- I. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan terdiri dari :
 1. Kegiatan Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - c. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- II. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks SPBE Tahun 2025 adalah sebesar Rp 41.493.618,- atau 99,85% dari total anggaran sebesar Rp. 41.556.178,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,15%.



SASARAN 3 :
MENINGKATNYA DIGITALISASI PEMERINTAHAN

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya digitalisasi pemerintahan terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.16 dibawah ini :

Tabel 3. 16 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja		2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,40	4,67	110,68%

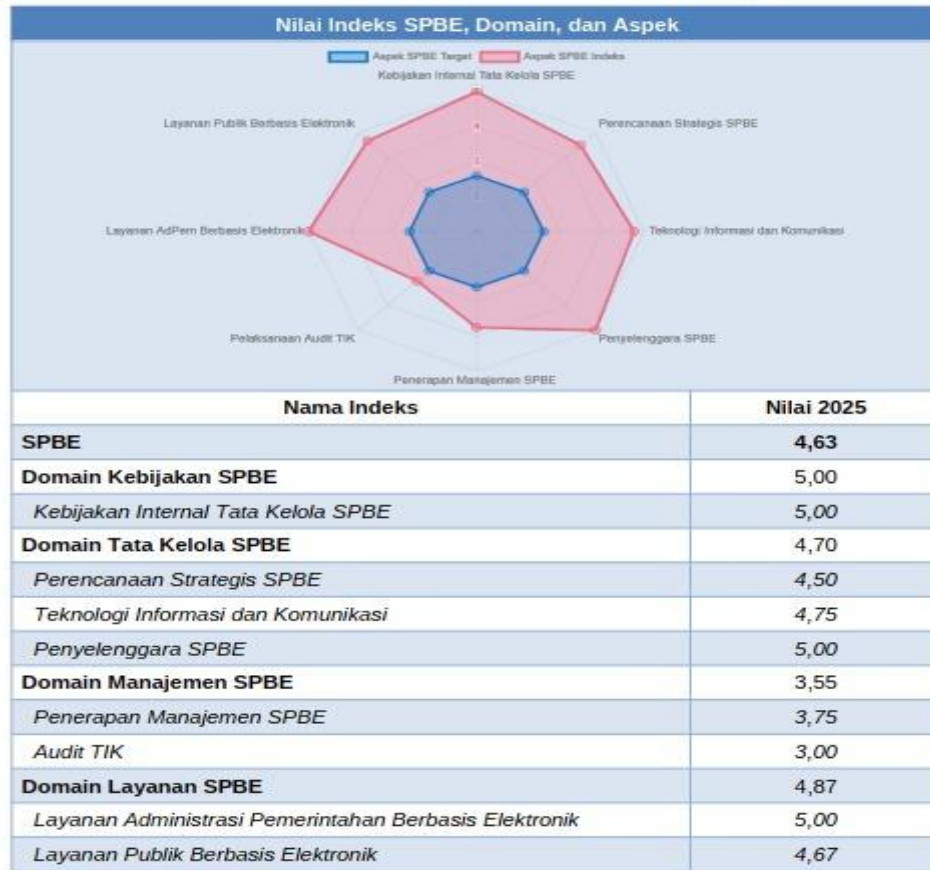
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.16 di atas dapat dilihat bahwa Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 dengan tingkat capaian 4,87 dengan capaian 110,68 % predikat sangat baik dari target 4,67 .

Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan layanan SPBE yaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Tingkat kematangan kapabilitas layanan diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum.

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. PESISIR SELATAN

4,63
(Memuaskan)



Gambar 3. 7 Nilai Indeks SPBE per Domain

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.17 dibawah ini :

Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
1	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,21	4,76	4,40	4,76	4,38	4,67	4,76	4,38	4,67

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.17 di atas dapat dilihat bahwa Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami kenaikan sebesar 0,49% dari 4,38 pada Tahun 2024 menjadi 4,87 pada Tahun 2025

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.18 dibawah ini :

Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir 2021-2026	Capaian Tahun 2025	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,45	4,87	114,59 %	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

h. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.19 dibawah ini.

Tabel 3. 19 Perbandingan Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
1	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,87	4,26*	3,78

Catatan : *) Data Capaian Tahun 2023

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

<https://data.sumbarprov.go.id/>

i. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilihat pada Tabel 3.20 dibawah ini :

Tabel 3. 20 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,76	4,87	114,59%

j. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3. 21 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Realisasi			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,40	4,87	110,68 %	2.359.291.034	2.322.012.415	98,42 %	14,11 %

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Rp. 2.359.291.034,-} \times 114,59\%) - \text{Rp.2.322.012.415,-}}{\text{Rp. 4.711.711.860,-} \times 114,59\%} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 2.703.511.596} - \text{Rp. 2.322.012.415}}{\text{Rp. 2.703.511.596,-}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 381.499.181,-}}{\text{Rp. 2.703.511.596,-}} \times 100\% = 14,11 \%$$

Target Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 adalah 4,40 dan untuk realisasinya Tahun sebesar 4,87 serta untuk capaian kinerja sebesar 110,68%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 14,11 % apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 4,76.

k. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- I. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari :
 1. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - c. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

II. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non
Elektronik

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.322.012.415,- atau 98,42% dari total anggaran sebesar Rp. 2.359.291.034,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 1,58%.



**SASARAN 4 :
MENINGKATNYA KETERBUKAAN
INFORMASI DAN PELAYANAN
PUBLIK**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Kategori Keterbukaan Informasi Publik.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.22 dibawah ini :

Tabel 3. 22 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja		2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (99,95)	Informatif (98)	98 %

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.22 di atas dapat dilihat bahwa Kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 dengan tingkat capaian Informatif (98) dengan capaian 98 % prediket sangat baik dari target Informatif (99,95).

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu:

1. Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%;
2. Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%;
3. Pelayanan Informasi Publik berbobot 25%; dan
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%.

Tabel 3. 23 Tabel kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

NO	KUALIFIKASI	NILAI
1	Informatif	97-100

2	Menuju Informatif	80-96
3	Cukup Informatif	60-79
4	Kurang Informatif	40-59
5	Tidak Informatif	<39

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor : 03/KEP/KI-PSB/XI/2025 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meraih **Terbaik II** dengan predikat **“Informatif”** dan Nilai **“98”** untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Dalam pencapaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 menyediakan :

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari serta Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola informasi dan dokumentasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pembinaan dan Monitoring langsung ke PPID Pelaksana dan PPID Nagari guna optimalisasi pengumuman dan penyediaan informasi publik dan memberikan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pengumpulan dan Penyusunan dokumen daftar informasi publik (DIP) melalui website masing-masing PPID Pelaksana yang terintegrasi dengan PPID Utama melalui halaman website: <https://ppid.pesisirseltankab.go.id/> yang diklasifikasikan dan diverifikasi oleh Tim Verifikator PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan. Total daftar informasi publik Tahun 2024 untuk masing-masing kategori:

a. OPD : 2.425 DIP

b. Nagari : 1.570 DIP

Total : 4.896 DIP

4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) publikasi Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Berita pada masing-masing website PPID Pelaksana dan Nagari. Dinas Kominfo selaku PPID Utama telah menetapkan Target Minimal Publikasi

Dokumen Informasi Publik dan Berita pada Website Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 500.12.18.1/217/KOMINFO-PS/2025.

5. Mengikuti Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informas dan Dokumentasi (PPID) se-Sumbar dan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) guna peningkatan kapasitas SDM PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan menyerahkan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
7. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan dari bulan November – Desember 2025.

Dalam pelaksanaan Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memakai teknik dan metode yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang terdapat pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan 2025, dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu :

- a. Pengembangan website
- b. Pengumuman informasi publik
- c. Pelayanan informasi publik
- d. Penyediaan informasi publik

Selain 4 (empat) indikator diatas, penilaian juga dilakukan dengan melihat sejauhmana unsur komitmen, kolaborasi dan inovasi dalam implementasi Undang-Undang KIP yang dinilai melalui visitasi/kunjungan lapangan ke Badan Publik. Secara teknis tahapan dari pemeringkatan ini dilakukan dalam 3 tahapan yaitu Pengisian Kuesioner oleh Badan Publik, kedua tahap verifikasi kuesioner dan website dan ketiga tahap visitasi/kunjungan lapangan ke 5 (lima) besar Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk masing-masing kategori Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari.

tahapan pengisian kuesioner diawali dengan pengiriman kuesioner penilaian mandiri/*self assesment questionnaire (saq)* oleh tim sekretariat

pemeringkatan yang selanjutnya harus diisi oleh ppid pelaksana dan ppid nagari yang akan menghasilkan penilaian tahap 1 sebagai dasar untuk menetapkan 5 (lima) besar badan publik dengan nilai tertinggi dan masuk dalam tahap selanjutnya yaitu presentasi/uji publik.

Setiap tahapan dan indikator memiliki bobot tersendiri yang terdiri dari :

1. Pengembalian Kuesioner dengan bobot nilai 10%. Setiap Badan Publik yang mengisi dan mengembalikan kuesioner penilaian mandiri akan mendapatkan bobot nilai sebesar 10 poin.
2. Tahapan verifikasi kuesioner dan website dengan bobot nilai 80%.
3. Tahapan Presentasi/Uji publik, dengan bobot nilai 10% dengan indikator penilaian sebagai berikut :
 - a. Komitmen (20%)
 - b. Koordinasi (20%)
 - c. Komunikasi (20%)
 - d. Kolaborasi (20%)
 - e. Konsistensi (20%)

Presentasi/Uji Publik dilaksanakan secara panel dengan menghadirkan Tim Penilai dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025 bertempat di Hotel Triza Painan.



Gambar 3. 8 Presentasi Badan Publik dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tk. Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025

Secara keseluruhan, tahapan, proses dan instrument yang digunakan tersebut akan menghasilkan nilai dan kualifikasi untuk masing-masing Badan Publik, sebagai berikut :

No.	Kualifikasi	Nilai	Notifikasi
1.	Informatif	90 – 100	Hijau

2.	Menuju Informatif	80 – 89,9	Biru
3.	Cukup Informatif	55 – 79,9	Oranye
4.	Kurang Informatif	40 – 54.9	Kuning
5.	Tidak Informatif	< 39,9	Merah

Selain itu, melalui pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Tim PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Kominfo, 2 (dua) nagari Perwakilan Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Nagari Air Haji Barat meraih prestasi sebagai Terbaik I dengan Predikat “Informatif” dan Nagari Muara Inderapura sebagai Terbaik II dengan Predikat “Informatif” dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

Penyerahan/Pengumuman Hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 diberikan kepada 5 (lima) Badan Publik (Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari) dengan nilai tertinggi untuk masing-masing kategori dan akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari hasil Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, Jumlah Badan Publik yang mengisi/mengembalikan Kuesioner Penilaian Mandiri/ *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) :

1. Perangkat Daerah sebanyak 20 OPD (76,92%)
2. Kecamatan sebanyak 10 Kecamatan (66,67%)
3. Nagari sebanyak 18 Nagari

Setelah melalui proses dan tahapan penilaian dalam Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Penilai kemudian menetapkan Berita Acara Penetapan Hasil Akhir Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, Nomor: Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 500.12.18.1/217/KOMINFO-PS/2025, dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3. 24 DAFTAR REKAP PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK TINGKAT KABUPATEN**

I. KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI TAHAP 1	NILAI PRESENTASI	TOTAL	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	76,32	9,80	86,12	Informatif	Terbaik 1
2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	76,25	8,84	85,08	Informatif	Terbaik 2
3	BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	70,32	9,34	79,66	Menuju Informatif	Terbaik 3
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	69,80	7,61	77,41	Menuju Informatif	Terbaik 4
5	RSUD dr. M.ZEIN PAINAN	66,96	8,60	75,56	Menuju Informatif	Terbaik 5

II. KATEGORI : KECAMATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	NILAI TAHAP 1	NILAI PRESENTASI	TOTAL	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	BASA AMPEK BALAI TAPAN	78,95	9,68	88,63	Informatif	Terbaik 1
2	LINGGO SARI BAGANTI	77,25	9,37	86,61	Informatif	Terbaik 2
3	BATANG KAPAS	71,44	9,32	80,76	Menuju Informatif	Terbaik 3
4	RANAH AMPEK HULU TAPAN	69,18	9,60	78,78	Menuju Informatif	Terbaik 4
5	AIRPURA	66,71	9,12	75,83	Menuju Informatif	Terbaik 5

III. KATEGORI : PEMERINTAHAN NAGARI

NO.	NAMA NAGARI	NILAI TAHAP 1	NILAI PRESENTASI	TOTAL	KUALIFIKASI	KETERANGAN
1	AIR HAJI BARAT	90,00	9,80	99,80	Informatif	Terbaik 1
2	MUARA INDERAPURA	90,00	9,65	99,65	Informatif	Terbaik 2
3	PASAR BARU	67,05	8,95	76,00	Menuju Informatif	Terbaik 3
4	TANAH BAKALI INDERAPURA	65,60	8,99	74,59	Cukup Informatif	Terbaik 4
5	TUIK IV KOTO MUDIEK	54,80	4,25	59,05	Cukup Informatif	Terbaik 5

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian indikator kinerja indeks nilai keterbukaan informasi publik tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.25 dibawah ini :

Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Hasil evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi	Informatif (99,92)	Informatif (99,95)	Informatif (99,95)	Informatif (97,20)	Menuju Informatif (88,68)	Inforatif (98)	Informatif (97,20)	Menuju Informatif (86,68)	Informatif (98)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Rp. 1.147.348.376,-} \times 98 \%) - \text{Rp.953.504.013,-}}{\text{Rp. 1.147.348.376,-} \times 98 \%}$$

$$\frac{\text{Rp. 1.124.401.408} - \text{Rp. 953.504.013}}{\text{Rp. 1.124.401.408,-}}$$

$$\frac{\text{Rp. 170.897.345,-}}{\text{Rp. 1.124.401.408,-}} \times 100\% = 15,20 \%$$

Dari Tabel 3.35 di atas dapat dilihat bahwa Kategori Keterbukaan Informasi Publik mengalami kenaikan sebesar 15,20 % dari MENUJU INFORMATIF (86,68) pada Tahun 2025 menjadi INFORMATIF (98).

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.26 dibawah ini :

Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir 2021- 2026	Capaian Tahun 2025	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	INFORMATIF (99,95)	INFORMATIF (98)	98%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.27 dibawah ini.

Tabel 3. 27 Perbandingan Kategori Keterbukaan Informasi Publik dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kabupaten	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	INFORMATIF (98)	INFORMATIF (93,36)	INFORMATIF (96,97)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

<https://komisiinformasi.go.id/>

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja Kategori Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat pada Tabel 3.28 dibawah ini :

Tabel 3. 28 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	INFORMATIF (99,95)	INFORMATIF (98)	98%

Faktor penyebab kegagalan dalam indikator ini adalah :

PPID ditingkat nagari tidak aktif sehingga kurangnya Data Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan ke website PPID Kabupaten Pesisir Selatan. Dari 182 Nagari hanya 34 Nagari yang melaksanakan publikasi DIP, hal ini disebabkan adanya pertukaran admin PPID yang ada di nagari.

Solusi yang dilakukan:

Perlu dilakukan pembinaan kepada admin-admin PPID baru tersebut untuk penguatan kapasitas admin PPID nagari agar target kinerja untuk keterbukaan

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3. 29 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Realisasi			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	INFORMATIF (99,95)	INFORMATIF (98)	98 %	1.147.348.376	953.504.013	83,11%	15,20%

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Rp. 1.147.348.376,-} \times 98\%) - \text{Rp.953.504.013,-}}{\text{Rp. 1.147.348.376,-} \times 98\%}$$

$$\frac{\text{Rp. 1.124.401.408} - \text{Rp. 953.504.013,-}}{\text{Rp. 1.124.401.408,-}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 170.897.395,-}}{\text{Rp. 1.124.401.408,-}} \times 100\% = 15,20\%$$

Target Kategori Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 adalah INFORMATIF (99,95), dan untuk realisasinya Tahun sebesar INFORMATIF (98) serta untuk capaian kinerja sebesar 83,11%. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 15,20 % apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 88,68

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- I. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik Kegiatan terdiri dari :
 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- II. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.322.012.415,- atau 98,42 % dari total anggaran sebesar Rp. 2.359.291.034,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 1,58%.



SASARAN 5 :

MENINGKATNYA KUALITAS INOVASI DAERAH

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas inovasi daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu nilai kematangan inovasi dinas komunikasi dan informatika.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.30 dibawah ini.

Tabel 3. 30 Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah Tahun 2025

Indikator Kinerja		2025		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Kematangan Inovasi PD	97	96	98,98%

Dari Tabel 3.30 diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika mencapai 96,00 dari target 97,00 atau tingkat capaiannya mencapai 98,98%. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri yaitu:

1. Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Nagari (Aplikasi SINAR)
2. Pengembangan Aplikasi SPBE
3. Aplikasi Informasi Penawaran Kerjasama Perusahaan Pers

Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Nomor : 500.10.30.3/1/4/Bapedalitbang/2025 perihal Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2025 maka ditetapkan bahwa ke tiga Inovasi yang Dinas Komunikasi dan Informatika di kirim ke Kementerian Dalam Negeri termasuk 3 Aplikasi yang dihasilkan pada Tahun 2025.

#	Pemda	Nama Inovasi*	Inovasi*	Nama Inisiator*	Utama	Inovasi Daerah*	Inovasi Daerah*	Kemampuan	Aksi
1	Kabupaten Pesisir Selatan	Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Nagari (Aplikasi SINAR)	Penerapan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	komunikasi dan informatika	01/04/2019	08/05/2019	88.00	[Icon]
2	Kabupaten Pesisir Selatan	Pengembangan Aplikasi SPBE	Penerapan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	komunikasi dan informatika	06/03/2023	03/04/2023	95.00	[Icon]
3	Kabupaten Pesisir Selatan	Aplikasi Informasi Penawaran Kerjasama Perusahaan Pers	Penerapan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	komunikasi dan informatika	04/04/2023	01/05/2023	95.00	[Icon]

Gambar 3. 9 Hasil Penilaian Inovasi Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PESIIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. H. Agus Salim Nomor 1 Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 26611
Telpom : (0786) 21113 Faksimile : (0786) 22293
Laman : <http://www.pesisirselatan.go.id> E-mail : sekretariat@pesisirselatan.go.id

Pesisir Selatan, 6 Januari 2026

Nomor : 500.10.30.14/Epapadilbang/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2025

Yth :
1. Kepala Perangkat Daerah
2. Direktur RSUD M. Zaini Pisman
3. Direktur RSUD Pratalma Tapan
4. Kepala LPT Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan

Sehubungan dengan hal di atas, hasil pelaporan Inovasi Daerah tahun 2025 agar dapat menjadi bahan evaluasi bagi Perangkat Daerah, RSUD dan LPT Puskesmas sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIIR SELATAN.

NO.	Perangkat Daerah, RSUD dan UPT	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Nilai Kemungkinan	Hasil Validasi	Nomor Register (Kemendagri)
1.	Satuan Pelaksana Keuangan, Perencanaan dan Aset Daerah	SISTEM INFORMASI PEMDAPATAN DAERAH (SIMPADAH)	Inovasi pelayanan publik	99,00	Terlakin	13.01-148159-2024
2.	Dinas Perikanan, Perikanan dan Lingswngan Hutan	Berdigitalisasi Sampah Menuju Zero Waste	Inovasi pelayanan publik	97,00	Terlakin	13.01-142996-2023
3.	Sekretariat Daerah	Apur Perambatan Pembangunan (Rapat Bang)	Inovasi Daerah berbasis sosial dengan Usulan Pemerintahan yang menggud kemampuan Daerah	96,00	Terlakin	13.01-114767-2023
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan Aplikasi SPBE	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	96,00	Terlakin	13.01-113215-2023
		Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Nagari (Aplikasi SINAR)	Inovasi pelayanan publik	96,00	Terlakin	13.01-126653-2023
		Aplikasi Informasi Penawaran Kerjasama Perusahaan Pers	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	92,00	Terlakin	13.01-113196-2023

Gambar 3. 10 Surat Penyampaian Hasil IGA Tahun 2025

Ada 20 indikator yang harus diisi OPD diantaranya adalah :

- Regulasi inovasi daerah*;
- Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*;
- Dukungan anggaran;
- Bimtek inovasi;
- Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD;
- Keterlibatan aktor inovasi;
- Pelaksana inovasi daerah;
- Jejaring inovasi;
- Sosialisasi inovasi daerah;
- Pedoman teknis;
- Kemudahan informasi layanan;
- Kecepatan penciptaan inovasi*;
- Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan;
- Penyelesaian layanan pengaduan;

- o) Online sistem;
 - p) Replikasi;
 - q) Penggunaan IT;
 - r) Kemanfaatan inovasi*;
 - s) Monitoring dan evaluasi inovasi daerah;
 - t) Kualitas inovasi daerah*;
- * Indikator wajib diisi

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.31 dibawah ini :

Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	97,00	95,00	96,00

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.31 di atas dapat dilihat bahwabahwa Nilai Kematangan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,00% dari 95,00 pada Tahun 2024 menjadi 96,00 pada Tahun 2025.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.32 dibawah ini:

Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir 2021-2026	Capaian Tahun 2025	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	97	96	98,98%	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi Dan Nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilaiNilai Kematangan Inovasi PD dapat dilihat pada Tabel 3.33 dibawah ini :

Tabel 3. 33 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	97	96	98,96%

Faktor penyebab kegagalan dalam indikator ini adalah :

Tidak tercapainya nilai kematangan inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika dikarenakan belum adanya replikasi oleh daerah lain

Solusi yang dilakukan

Meningkatkan nilai kematangan inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya mengusahakan adanya replikasi oleh daerah lain

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3. 34 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Realisasi			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	95	95%	4.711.711.860	4.573.356.549	97,06 %	1,92%

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{(\text{Rp. 4.711.711.860,-} \times 98,96 \%) - \text{Rp.4.573.356.549,-}}{\text{Rp. 4.711.711.860,-} \times 98,96 \%$$

$$\frac{\text{Rp. 4.662.710.057-} - \text{Rp. 4.573.356.549,-}}{\text{Rp. 4.662.710.057,-}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 89.353.508,-}}{\text{Rp. 4.662.710.057,-}} \times 100\% = 1,92 \%$$

Target Inovasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah 97, dan untuk realisasinya Tahun sebesar 96 serta untuk capaian kinerja sebesar 98,96%. Angka

tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.92 % apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 88,68

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi PD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah sebesar Rp 4.573.356.549 atau 97,06% dari total anggaran sebesar Rp. 4.711.711.860,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 2,94%.

3.4 Realisasi Keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun anggaran 2025 didukung anggaran sebesar Rp. 8.343.030.650,- yang seluruhnya bersumber pada APBD, dengan komposisi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 3.918.647.307,- yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.424.383.343,- dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi anggaran dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, dengan rincian per Program sebagai berikut :

Tabel 3. 35 Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	4.711.711.860	4.573.356.549	97,06%
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	2.359.291.034	2.322.012.415	98,42%
3	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.359.291.034	2.322.012.415	98,42%
4	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	1.147.348.376	953.504.013	83,11%
5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	4.711.711.860	4.573.356.549	97,06%

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

a. Capaian Sasaran

Dari laporan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 khususnya di tahun anggaran 2025 dapat terpenuhi sesuai harapan. Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan baik sesuai ketentuan. Namun hal tersebut, bila ditinjau dari segi anggaran tidak semua mencapai 100% hal tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran.

b. Capaian Indikator

Capaian terhadap 5 indikator dari 5 sasaran sudah melebihi target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun pencapaian dari Indikator :

- Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah nilai 102.6%
- Indeks SPBE sebesar 108,9 %
- Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 110,6%
- Kategori Keterbukaan Informasi Publik sebesar 98,05 %
- Nilai Kematangan Inovasi PD sebesar 98,97% .

c. Capaian Realisasi Keuangan

Tahun 2025`Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan didukung anggaran sebesar Rp. 8.343.030.650,-,- yang seluruhnya bersumber pada APBD, dengan komposisi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp.3.918.647.307,- yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.424.383.343,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.959.632.695,- (96,52%)

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Meningkatkan kerjasama dengan Stakeholders terkait atau pemangku kepentingan, baik Pemerintah Provinsi dan Pusat, dalam melaksanakan program-program pembangunan yang dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun, selanjutnya diharapkan kritik dan saran bagi perbaikan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan guna mencapai peningkatan kinerja yang lebih baik pada tahun yang akan datang.